KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran) Ext.363 Faksmile (021) 5253139

PENGUMUMAN

NOMOR : SEK.KP.02.01-490

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)

1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
5. Direktorat Jenderal Imigrasi.
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
8. Inspektorat Jenderal.
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat (Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Balai Harta Peninggalan, dan Rumah Sakit Pengayoman).

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				Jumlah Formasi	Keterangan
			Cum laude	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Umum		
1.	Penjaga Tahanan	SLTA Sederajat	-	-	280	13.720	14.000	P = 11.423 W = 2.297
2.	Pembimbing Kemasyarakatan *Pertama*	S-1 Psikologi / Sosiologi / Hukum	62	-	-	652	714	P = 497 W = 155
3.	Analis Keimigrasian Pertama	S-1 Hukum / Sosial Politik / Ekonomi / Akuntansi / Komunikasi / Teknik Informatika / Ilmu Komputer / Sistem Informasi / Teknik Komputer / Sastra Bahasa Asing	229	-	-	2.049	2.278	P = 1.799 W = 250
4.	Pemeriksa Keimigrasian Terampil	D-III Akuntansi / Manajemen / Kearsipan / Ilmu Komputer / Sistem Informasi / Manajemen Informatika / Teknik Informatika / Keuangan / Sastra Bahasa Asing	-	-	-	30	30	
5.	Pemeriksa Merek Pertama	S-1 Hukum / Manajemen / Teknik / Humaniora / Farmasi	2	-	-	13	15	
6.	Pemeriksa Paten Pertama	S-1 Kimia / Biologi / Farmasi / Fisika / Teknik Eelektro / Teknik Mesin / Teknik Sipil / Teknologi Pertanian / Teknologi Perikanan dan Teknik di bidang International Patent Classification (IPC)	2	-	-	13	15	
7.	Analis Kekayaan Intelektual	S-1 Seni Rupa / Desain / Teknik / Hukum / Manajemen	1	-	-	14	15	
8.	Analis Hukum	S-1 Hukum	22	-	-	114	136	
9.	Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	S-1 Hukum / Sosial Politik	4	1	-	35	40	
10.	Penata Keuangan	S-1 Ekonomi Manajemen / Akuntansi / Manajemen Keuangan / Komputerisasi Akuntansi	2	-	-	23	25	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				Jumlah Formasi	Keterangan
			Cum laude	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Umum		
11.	Kustodian Kekayaan Negara	S-1 Ilmu Bisnis Dan Manajemen / Sosial Politik / Ekonomi Manajemen / Hukum/ Akuntasi	2	-	-	18	20	
12.	Pengelola Teknologi Informasi	S1 Teknik Informatika / Sistem Informasi / Ilmu Komputer / Teknik Komputer	11	-	-	59	70	
13.	Dokter Umum Pertama	Dokter Umum	-	-	-	33	33	
14.	*Perawat Pertama*	S1 *Keperawatan + Ners*	7	-	-	93	100	
15.	Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	Kedokteran Spesialis Kulit dan Kelamin	-	-	-	1	1	
16.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pertama	Kedokteran Spesialis Penyakit Dalam	-	-	-	1	1	
17.	Dokter Spesialis Anak Pertama	Kedokteran Spesialis Anak	-	-	-	1	1	
18.	Dokter Spesialis Ginekologi Pertama	Kedokteran Spesialis Ginekologi	-	-	-	1	1	
19.	Dokter Spesialis Anastesi Pertama	Kedokteran Spesialis Anastesi	-	-	-	1	1	
20.	Psikolog Klinis Pertama	S1 Psikologi	2	-	-	13	15	
21.	Auditor Pertama	S1 Ilmu Hukum / Psikologi / Akuntansi / Administrasi Pendidikan / Teknik Informatika / Ilmu Komputer / Sistem Informasi / Administrasi Negara / Administrasi Bisnis / Administrasi Perpajakan	-	-	-	15	15	
Total			**346**	**1**	**280**	**16.899**	**17.526**	

Catatan :

P = Pria dan W = Wanita, kuota pria dan wanita pada tabel diatas hanya berlaku untuk formasi pelamar dengan kriteria umum sedangkan formasi bagi pelamar dengan kriteria cumlaude, disabilitas dan putra/putri Papua dan Papua Barat tidak didasarkan pada kuota pria dan wanita

III. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukan bagi pelamar dengan kriteria :
   a. *Cumlaude adalah pelamar lulusan terbaik (cumlaude / dengan pujian) dari Perguruan* Tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus *cumlaude* / pujian pada ijasah atau transkrip nilai.
   b. Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabiltas / berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
   c. Putra / Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar dengan kriteria menamatkan pendidikan SD, SMP / SLTP, dan SMU / SLTA di wilayah Papua dan Papua Barat atau berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak) asli Papua (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan/ kepala desa).
   d. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b dan c diatas.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

IV. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Warga Negara Indonesia.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir)
9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Bagi Wanita tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
11. Pelamar merupakan lulusan :
    a. Dokter Spesialis, Dokter Umum, Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima). Khusus untuk pelamar dengan kategori Putra/Putri Papua dan Papua Barat IPK minimal adalah 2,50 (dua koma lima puluh).
    b. SLTA Sederajat dengan nilai minimal pada Ijazah rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) atau 3 (tiga) skala 1 sampai 4 atau B dan diutamakan memiliki keterampilan komputer (melampirkan sertifikat komputer). Khusus untuk pelamar dengan kategori Putra/Putri

Papua dan Papua Barat dengan nilai minimal pada Ijazah rata-rata 6,0 (enam koma nol) atau 2 (dua) skala 1 sampai 4 atau C dan diutamakan memiliki keterampilan komputer (melampirkan sertifikat komputer).

12. Usia pada tanggal 1 Agustus 2017 :
    a. Minimal 18 tahun dan Maksimal 33 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Dokter Spesialis, Dokter Umum Sarjana / S-1
    b. Minimal 18 tahun dan Maksimal 30 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Diploma III / D-III
    c. Minimal 18 tahun dan Maksimal 28 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk SLTA
13. Tinggi badan untuk pelamar jabatan Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian :
    a. Pria minimal 165 cm
    b. Wanita minimal 158 cm
14. Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan :
    a. Pria minimal 160 cm
    b. Wanita minimal 155 cm
15. *Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Diploma III/D-III dan SLTA Sederajat yang* mendaftar pada Kantor Wilayah harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam KTP. Apabila pelamar yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP dan ingin mendaftar pada wilayah domisilinya, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili minimal 1 (satu) tahun pada wilayah tersebut.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar dengan Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana/S-1:
    a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
        1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta, diketik mengunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dapat diunduh dilaman : *https://sscn.bkn.go.id*
        2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
        3) Apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut minimal 1 tahun. .
        4) Ijazah dan Transkrip Nilai Ijazah asli.
        5) Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman : *https://sscn.bkn.go.id*)
        6) Pas photo berlatar belakang warna merah berukuran 3 x 4 (1 lembar)
    b. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman : *https://sscn.bkn.go.id* dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
    c. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal 1 Agustus 2017 s.d. 31 Agustus 2017 (ditutup pukul 23.59 WIB).
    d. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman : *https://sscn.bkn.go.id* dimulai pada tanggal 6 September 2017 s.d. 9 September 2017.

2. Pelamar dengan Kualifikasi Pendidikan Diploma III / D-III dan SLTA/Sederajat :
   a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
      1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam yang (format surat lamaran dapat diunduh dilaman: *https://sscn.bkn.go.id).*
      2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
      3) Apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut minimal 1 tahun.
      4) Fotokopi Ijazah / STTB dan Daftar Nilai pada Ijazah / STTB.
      5) Fotokopi Ijazah SD, ijazah SLTP dan Ijazah SLTA sebagai bukti pelamar *menamatkan sekolah di wilayah Papua dan Papua Barat atau Asli Surat* keterangan dari kelurahan / kepala desa yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak) asli dari Papua Khusus untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dari kriteria pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
      6) Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman : *https://sscn.bkn.go.id*).
      7) Pas photo terbaru berlatar belakang warna merah berukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
      8) Lembar bukti pendaftaran yang dicetak dari laman *https://sscn.bkn.go.id*.
   b. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman : *https://sscn.bkn.go.id* dengan menggunakan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
   c. Pendaftaran *online* dimulai pada tanggal 1 Agustus 2017 s.d. 26 Agustus 2017 (ditutup pukul 23.59 WIB).
   d. Setelah mendapatkan kartu pendaftaran, pelamar mengirimkan berkas lamaran sesuai persyaratan pelamaran melalui PO. BOX dari masing-masing Kantor Wilayah yang dituju (daftar alamat PO. BOX terlampir).
   e. Batas waktu penerimaan berkas lamaran pada PO. BOX paling lambat diterima pada tanggal 31 Agustus 2017 pukul 16.00 waktu setempat.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana / S-1.
   a. Seleksi Administrasi
   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT)
   c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
      - Substansi Jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 50%.
      - Wawancara dengan bobot 50%.
   d. Khusus pelamar jabatan pengelola Teknologi Informasi, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
      - Praktik kerja komputer dengan bobot 50%.
      - Wawancara dengan bobot 50%.

2. Tahapan Seleksi Diploma III / D-III
   a. Seleksi Administrasi terdiri dari :
      - Verifikasi dokumen lamaran yang diterima melalui PO. BOX
      - Verifikasi dokumen asli dan Pengukuran tinggi badan
   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT)
   c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
      - Substansi Jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 50%.
      - Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) dengan bobot 50%.
3. Tahapan Seleksi SLTA / Sederajat
   a. Seleksi Administrasi terdiri dari :
      - Verifikasi dokumen lamaran yang diterima melalui PO. BOX
      - Verifikasi dokumen asli dan Pengukuran tinggi badan
   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
   c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
      - Kesamaptaan dengan bobot 50%.
      - Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) dengan bobot 50%.

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi :
   a. *Kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana / S-1 didasarkan* pada hasil Verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman *http://cpns.kemenkumham2017.go.id*. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman *https://sscn.bkn.go.id*.
   b. Kualifikasi pendidikan Diploma III / D-III dan SLTA/Sederajat didasarkan pada :
      - Hasil verifikasi dokumen yang telah diterima melalui PO. BOX, hasil verifikasi tersebut akan diumumkan oleh panitia pada laman *http://cpns.kemenkumham2017.go.id*.
      - Bagi pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen melalui PO BOX wajib melakukan verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan.
      - Hanya pelamar yang lulus verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan yang mendapatkan kartu peserta ujian dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan dalam satu wilayah.
4. Dengan pertimbangan peluang kelulusan, terhadap peserta yang mendaftar pada jabatan Penjaga Tahanan (nomor 1) dan Pemeriksa Keimigrasian Terampil (nomor 4) yang telah lulus SKD di satu wilayah diberikan kesempatan untuk berpindah ke wilayah lain yang kuota formasinya belum terpenuhi, kecuali untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Perpindahan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran secara online pada laman http://cpns.kemenkumham2017.go.id dengan konsekuensi mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) dan penempatan tugas pada wilayah tersebut. Jumlah peserta yang dimungkinkan melakukan pindah lokasi mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tidak melebihi 20% dari kuota formasi yang ada di wilayah tersebut.

5. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui website pada tanggal 11 Juli 2017.
2. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi :
   - Untuk kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana/S1 dilaksanakan di Jakarta
   - *Untuk kualifikasi pendidikan Diploma III / D-III dan SLTA/Sederajat dilaksanakan di* masing-masing Kantor Wilayah, khusus alokasi formasi Kalimantan Utara pelaksanaan seleksi dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur
3. Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil formasi Kalimantan Utara penetapan penempatan tugas pertama di Kantor Wilayah Kalimantan Timur sepanjang belum beroperasinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Utara.
4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
9. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
10. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di *http://cpns.kemenkumham2017.go.id*
11. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Tahun Anggaran 2017 dapat mengubungi *Call Center* yang dapat dihubungi :
    - Telephone (021) 5253004 (ext 310) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB
    - Twitter @cpnskumham2017 pada hari Senin s.d. Minggu pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB
12. Pengaduan Pelaksanaan seleksi CPNS di Nomor 081517290951 (hanya menerima whatsApp dan SMS).

Jakarta, 11 Juli 2017
Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

Bambang Rantam Sariwanto
NIP.196012151988021001

JADWAL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2017

A. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ,DOKTER DAN SARJANA/S-1

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	11 Juli - 31 Juli 2017
2.	Pendaftaran Online (*https://sscn.bkn.go.id/*)	1 Agustus - 31 Agustus 2017
3.	Pengumuman seleksi administrasi	5 September 2017
4.	Cetak nomor ujian secara online	6 September - 9 September 2017
5.	Seleksi Kompetensi Dasar	11 September - 16 September 2017
6.	Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	20 September 2017
7.	Seleksi Kompetensi Bidang (CAT)	9 Oktober - 11 Oktober 2017
8.	Seleksi Kompetensi Bidang Praktek komputer (Khusus jabatan pengelola Teknologi Informasi)	12 Oktober - 13 Oktober 2017
9.	Seleksi Kompetensi Bidang Melalui Wawancara	16 Oktober - 19 Oktober 2017
10.	Pengumuman kelulusan akhir secara online	9 November 2017
11.	Pemberkasan bagi perserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	13 November – 16 November 2017

B. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DIPLOMA III (D-III) DAN SLTA/SEDERAJAT

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	11 Juli - 31 Juli 2017
2.	Pendaftaran Online (*https://sscn.bkn.go.id/*)	1 Agustus - 26 Agustus 2017
3.	Pengiriman Berkas PO BOX	1 Agustus - 31 Agustus 2017
4.	Pengumuman seleksi administrasi	5 September 2017
5.	Pemanggilan / Verifikasi Dokumen atau Berkas Asli , Pengukuran Tinggi Badan dan Pemberian Kartu Peserta Ujian	11 September - 16 September 2017
6.	Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	25 September - 3 Oktober 2017
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi Passing Grade atau ketentuan lain yang diatur oleh KemenPAN dan RB	4 Oktober 2017
8.	Pengumuman Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	9 Oktober 2017
9.	Seleksi Kompetensi Bidang Melalui CAT (Diploma III) dan Kesamaptaan (SLTA / Sederajat)	23 Oktober - 28 Oktober 2017
10.	Seleksi Kompetensi Bidang Melalui Pengamatan Fisik dan Keterampilan	30 Oktober - 2 November 2017
11.	Pengumuman kelulusan akhir secara online	9 November 2017
12.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	13 November – 16 November 2017

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website http://cpns.kemenkumham2017.go.id

Jakarta, 11 Juli 2017
Sekretaris Jenderal,
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Bambang Rantam Sariwanto
NIP. 196012151988021001

DAFTAR ALAMAT PO. BOX PELAKSANAAN SELEKSI CPNS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I TAHUN 2017

NO.	KANTOR WILAYAH	NOMOR PO. BOX
1.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh	PO BOX 123 BANDA ACEH 23114
2.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	PO BOX 1087 Medan 20000
3.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	PO BOX 154 Kode Pos 25133
4.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau	PO BOX 32 TANJUNGPINANG 29100
5.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	PO BOX 5555 PALEMBANG 30162
6.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu	PO BOX 3811/BN 38225
7.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi	PO BOX 132 Kode Pos 36000
8.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung	PO BOX 3347 Pangkalpinang 33100
9.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	PO BOX 2277 Pekanbaru 28111
10.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung	PO BOX 1235 BDL 35000
11.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	PO BOX 1212 Serang 42100
12.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	PO BOX 4555/JKTM 12700
13.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat	JABAR PASTI KAHIJI BANDUNG 40000
14.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta	PO BOX 1262 YK 55000
15.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	PO BOX 888 /SM 50000 Semarang 50126
16.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur	PO BOX 1277 SB 60012
17.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali	PO BOX 3064 Denpasar 80000
18.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	PO BOX 1000 Kode Pos 85001
19.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat	PO BOX 1059 Mataram 83127
20.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat	PO BOX 7352 PTK 78121
21.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur	PO BOX 1412 Samarinda 75001
22.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah	PO BOX 3150/PALANGKARAYA 73000
23.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	PO BOX 123/BJM 70000

24.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara	PO BOX 6161 Manado 95000
25.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	*PO. BOX 1219 Makassar 90223*
26.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah	PO BOX 7717 Kodepos 94231
27.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	PO BOX 93086 Kendari 93111
28.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	*PO BOX 888/SULBAR 91500*
29.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo	PO BOX 3131/Gt/96100
30.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	PO BOX : 111/Kumham Ternate 97712
31.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku	*PO BOX 1001 Kode Pos 97115*
32.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	Tromol Pos Abepura Nomor 12
33.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat	PO BOX 98315 MW 98315

Jakarta, 11 Juli 2017
Sekretaris Jenderal,
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

Bambang Rantam Sariwanto
NIP. 196012151988021001